



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGI 2021 - 2026 KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, Rahmat dan karunia-Nya dan dukungan dari semua staf Kecamatan Telaga Bauntung, sehingga penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021 – 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan secara akuntabel dan transparan. Semoga Perubahan Kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021 – 2026 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Telaga Bauntung, 19 Februari 2024

Camat



EDDY HANDHOKO,SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19800521 200501 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN	13
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan	13
2.2 Sumber Daya Kecamatan	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	20
2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan	20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	22
2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan kecamatan	22
2.3.2 Sumber Dana.....	24
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	26
2.4.1 Kendala	26
2.4.2 Peluang.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.2.1 Visi	28
3.2.2 Misi	29
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi	31
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
4.1.1 Tujuan.....	33
4.1.2 Sasaran.....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	41
6.2 Indikator Kinerja.....	41
6.3 Kelompok Sasaran.....	41
6.4 Pendanaan.....	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57

7.1	Indikator Kinerja.....	57
7.2	Pedoman Transisi.....	57
BAB VIII PENUTUP		58
LAMPIRAN		59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2024	20
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2016-2021	23
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar.....	25
Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan	27
Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026	29
Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026	31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	34
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021-2026.....	38
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021-2026.....	43
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan	57
Tabel 7.2 Pedoman Transisi Renstra Kecamatan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

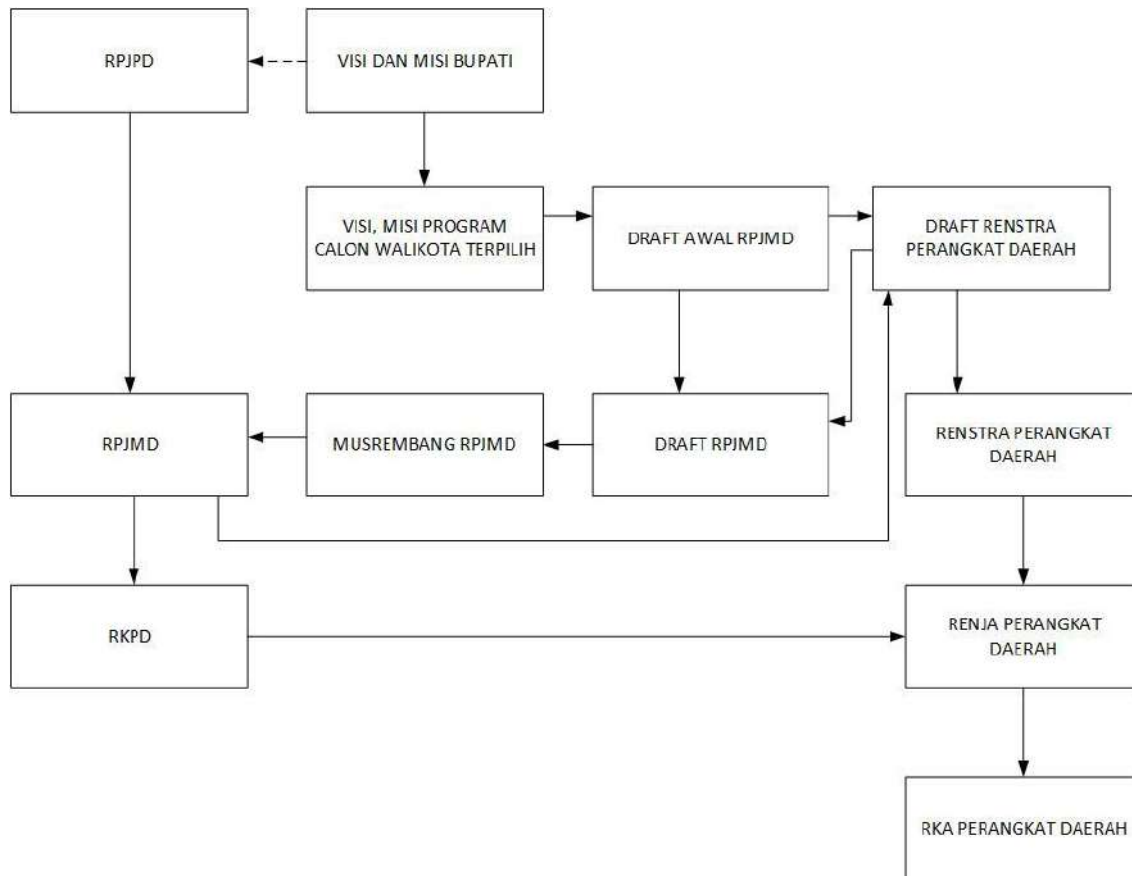
Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan ke dua Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021–2026 ini disusun dalam rangka menyesuaikan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Telaga Bauntung 2021 -2026 Kabupaten Banjar didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar serta sebagai dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Telaga Bauntung
4. Sebagai pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Telaga Bauntung
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Telaga Bauntung
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung
- BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Telaga Bauntung**
- 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung
 - 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : Tujuan, Sasaran**
- Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Telaga Bauntung
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**
- Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Telaga Bauntung
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatatif
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : Penutup

Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021 -2026

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Telaga Bauntung

Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

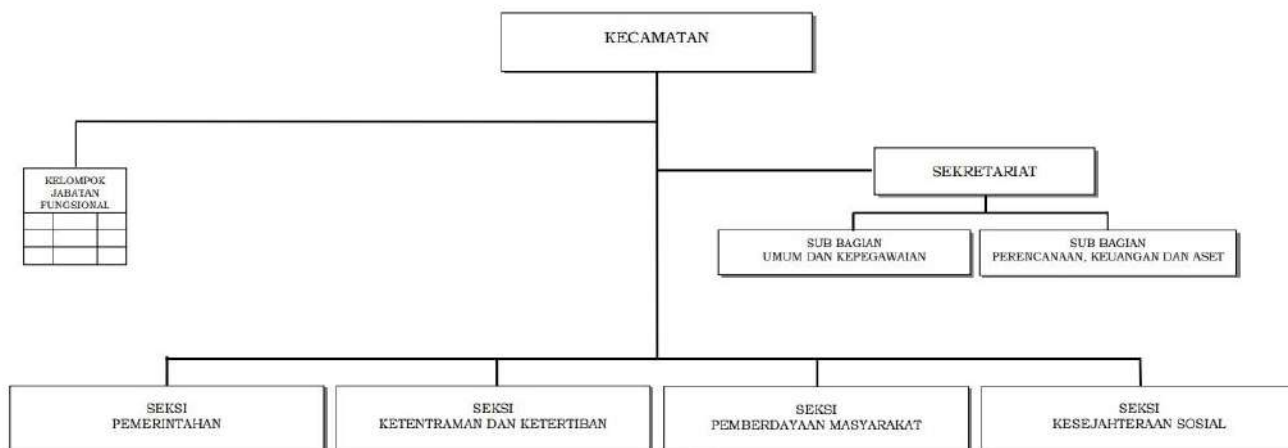
1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretaris Camat

1. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
8. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
9. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
10. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
11. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
12. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas

pegawai; dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
15. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi Pemerintahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
11. melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

7. melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;

7. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 - a. penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 - c. perpustakaan desa;
 - d. bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 - g. pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - h. pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - i. penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - j. pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - k. pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - l. penataan ruang kawasan terpadu;
 - m. peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - n. identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - o. rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
9. fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
10. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
12. menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Telaga Bauntung

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Telaga Bauntung

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Camat			1		1						1				1
2	Sekretaris			1		1				1						1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1					1				1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1							1		1
7	Kasubag Renc & Keu				1		1					1				1
8	Kasubag Umpeg				1		1					1				1
9	Pelaksana						1	2						2		3
10	Fungsional					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tenaga Honor/Kontrak										-	2	-	2	1	5
	Jumlah	-	-	2	4	2	5	2	-	1	-	5	1	5	1	14

Sumber: Data diolah

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Telaga Bauntung

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit		
2	Kendaraan Roda 2	17 Unit	10 Unit	5 Unit	2 Unit
3	Portable Generating Set	2 Buah	2 buah		
4	Portable Water Pump	2 Buah	1 buah		1 buah
5	Global Positioning System	1 Buah	1 buah		
6	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1 Buah	1 buah		
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1 Buah	1 buah		
8	Lemari Besi/Metal	4 Buah	4 buah		
9	CCTV	1 Unit	1 Unit		
10	Rak Kayu	1 Buah	1 buah		
11	Mesin Absen	1 Unit	1 Unit		
12	Filing Cabinet Besi	5 Buah	5 buah		
13	Papan Pengumuman	10Buah	10buah		
14	Lemari Kaca	2 buah	2 buah		
15	Meja Rapat	6 Buah	3 buah		3 buah
16	Kasur/Spring Bed	1 Buah	1 buah		
17	Televisi	2 Buah	2 buah		
18	Mesin pemotong rumput	1 Buah	1 buah		
19	Lemari ES	2 Buah	2buah		
20	Kipas Angin	4 Buah	4 Buah		
21	Kompore Gas	2 Buah	2 buah		
22	Kursi rapat	75 Buah	75 buah		
23	Kursi Kerja	8 buah	8 buah		
24	sofa	2 Buah	2 buah		
25	Bangku tunggu besi	1Buah	1 buah		
26	Sound System	3 Buah	2 buah		1 buah
27	AC Split	5 Buah	5 buah		
28	Camera video	1 Buah	1 buah		
29	Handicam	1 Buah	1 buah		
30	Mini PC	1 Buah	1 buah		
31	PC	5Buah	4 buah		1 buah
32	Laptop	7 Buah	4 buah	3 buah	
33	Printer	11 buah	4 buah	6 buah	1 buah
34	Apar	2 Buah	2 buah		
35	Proyektor	1 Unit	1 Unit		
36	HT	1Buah	1 buah		
37	Meja Kerja Pejabat Esellon III	2 Buah	2 buah		
38	Meja Kerja Non Struktural	5 Buah	5 buah		
39	Kursi kerja Pejabat Esselon III	1 Buah	1 buah		
40	Kursi Kerja Non struktural	4 Buah	4 buah		

41	Kursi Tamu	1 Buah	1 buah		
42	Monitor	1 buah	1 bua		
43	Peralatan Jaringan	1 Unit	1 Unit		
Jumlah		208	185	14	9

Sumber : Data BMD Kecamatan Telaga Bauntung , Per- Desember 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung

Sesuai tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, maka selama kurun waktu tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung telah secara nyata melaksanakan serta pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat di lihat dari nilai capaian SKM berturut – turut sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2016 dengan nilai / skor 70,00 %
2. IKM Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2017 dengan nilai / skor 76,00 %
3. IKM Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2018 dengan nilai / skor 80, 00%
4. IKM Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2019 dengan nilai / skor 82, 42 %
5. IKM Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2020 dengan nilai / skor 82, 28 %
6. IKM Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021 dengan nilai / skor 86,08 %

2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan kecamatan Telaga Bauntung

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2021-2026, Kecamatan Telaga Bauntung memberikan pelayanan dalam bidang administrasi, barang dan jasa. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung				76	80	82,42	82,28	86,08	76	80	82,42	82,28	86,08	100	100	100	100	100

2.3.2 Sumber Dana

Sumber pendanaan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banjar, tidak ada dana lainnya seperti APBN dan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.

Alokasi anggaran kinerja pelayanan dan realisasi serapan anggaran pada Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar

Uraian	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Capaian Pada Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Daerah	-	5,361,454,200	5,841,731,000	11,200,049,524	9,901,326,651	-	5,192,930,341	5,478,642,356	10,141,290,884	8,136,850,065	-	96,86	93,78	90,55	82,18
Belanja Tidak Langsung	-	2,067,000,000	2,352,000,000	2,352,000,000	4,182,596,000	-	1,986,500,000	2,148,900,000	2,048,831,668	2,755,522,635	-	96,11	91,36	87,11	65,88
Belanja Langsung	-	3,294,454,200	3,489,731,000	8,848,049,524	5,718,730,651	-	3,206,430,341	3,329,742,356	8,092,459,216	5,381,327,430	-	97,33	95,42	91,46	94,10
Program : Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	-	3,294,454,200	3,489,731,000	8,848,049,524	5,718,730,651	-	3,206,430,341	3,329,742,356	8,092,459,216	5,381,327,430	-	97,33	95,42	91,46	94,10
Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	1,284,712,240	1,133,679,900	1,157,095,228	-	-	1,259,757,068	1,083,618,974	1,114,930,292	-	-	98,06	95,58	96,36	-
Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	-	2,009,741,960	2,356,051,100	569,450,000	1,954,312,226	-	1,946,673,273	2,246,123,382	549,100,000	1,826,705,087	-	96,86	95,33	96,43	93,47
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	2,590,966,000	462,140,000	-	-	-	2,433,114,900	448,110,000	-	-	-	93,91	96,96
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD)	-	-	-	2,450,000,000	-	-	-	-	2,081,975,500	-	-	-	-	84,98	-
Kegiatan : Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	-	-	-	-	581,740,000	-	-	-	-	512,298,268	-	-	-	-	88,06
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	24,022,000	-	-	-	-	23,252,000	-	-	-	-	96,79
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	-	-	-	-	33,796,425	-	-	-	-	23,403,425	-	-	-	-	69,25
Kegiatan : Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-	-	-	-	11,480,000	-	-	-	-	8,122,000	-	-	-	-	70,75
Kegiatan : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	-	-	-	89,240,000	-	-	-	-	80,642,000	-	-	-	-	99,00

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung

2.4.1 Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

1. Faktor kemampuan dan jumlah aparatur atau Petugas Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung .yang masih minim menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pelayanan.
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Telaga Bauntung juga sangat mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Telaga Bauntung sehingga belum terjalin komunikasi yang lancar.
4. Masih adanya jalur birokrasi yang panjang dalam pengurusan dokumen dari Instansi di atasnya sehingga banyak waktu yang tidak dapat dioptimalkan.
5. Sistem Inovasi yang dapat membantu memberikan kemudahan, kelancaran serta efektif dan efisien masih belum ada.

2.4.2 Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam pengembangan pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat yang dimiliki oleh setiap aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Telaga Bauntung sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna pelayanan
- 2) Pemahaman aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung yang cukup baik terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dijalankan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan amanah
- 3) Petugas pelayanan dan aparatur Kecamatan Telaga Bauntung sudah memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya kerjasama yang baik antar bidang sehingga dapat menciptakan pelayanan yang baik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TELAGA BAUNTING

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Telaga Baunting

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Telaga Baunting Kabupaten Banjar dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Telaga Baunting Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Telaga Baunting

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum optimal	Pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan belum optimal Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belum optimal	Pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan belum optimal. Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan belum optimal	Pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal
			Pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal
		Koordinasi dan Fasilitasi	Pengelolaan Data Penyelenggaraan

	Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan belum optimal	Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan belum optimal.
		Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visidan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar .

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang

diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang. ○ Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development</i>
MANDIRI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. ○ Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. ○ Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
AGAMIS	<p>Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.</p>

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”**

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indicator Indeks Reformasi Birokras. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 sasaran, dimana Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD) .

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN
Misi 4: Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif	Terwujudnya Birokrasi yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Kewilayahan

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar antara lain:

1. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, maka untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan SDM.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis

Sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Isu-Isu Strategi di Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar yaitu Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang meliputi :

1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Teselenggaranya reformasi dalam pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang. (Rujukan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		84	85	86	87	88,31
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	70	77	79	82	85

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun sub kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Telaga Bauntung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan

pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis.			
Misi : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.
		3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait .
		4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan

			Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
		5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
		6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Sumber Data : Diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menginformasikan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program dan rencana subkegiatan untuk setiap kegiatan, lengkap dengan indikatornya. Pemilihan program dan kegiatan maupun subkegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain hal tersebut di atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar masuk dalam Unsur Kewilayahan yang mengampu Bidang Urusan Pemerintahan telah menyusun Program/Kegiatan/SubKegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur

Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2021- 2026.

6.4 Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

Adanya perubahan indikator sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan perubahan pada matriks Renstra. Selengkapnya terkait dengan program dan kegiatan maupun subkegiatan pada Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar. Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitung an	Data Target pada Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terselenggara reformasi dalam pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang diterima oleh masyarakat, dengan unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan SKM sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017, yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbangan		84	2.369.211.653	85	2.132.798.378	86	2.529.579.976	87	3.839.811.551	88,31	2.943.234.551	88,31	2.940.234.551	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar

					06	Logistik Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan	logistik yang tersedia di kecamatan pada tahun n	logistik yang tersedia di kecamatan												Bauntu ng			
			7	1	1	206	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Menunjukkan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia di kecamatan pada tahun n	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia di kecamatan	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.120.000	1 Paket	2.630.028	1 Paket	2.870.000	1 Paket	2.870.000	1 Paket	2.870.000	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	206	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Menunjukkan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menunjukkan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	1 Laporan	88.760.000	1 Laporan	92.760.000	1 Laporan	95.235.000	1 Laporan	146.000.000	1 Laporan	146.000.000	1 Laporan	146.000.000	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Menunjukkan Jumlah pelaksanaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana	Jumlah pengadaa n BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana : Jumlah pengadaa n BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan x 100%	100%	15.500.000	100%	36.439.000	100%	23.918.000	100%	937.802.250	100%	140.625.250	100%	140.625.250	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	207	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Menunjukkan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 Unit	480.000.000	2 unit	66.250.000	2 unit	66.250.000	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	207	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Menunjukkan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 unit	7.427.000	1 unit	14.000.000	1 unit	14.000.000	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	207	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Menunjukkan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.500.000	3 Unit	36.439.000	4 Unit	23.918.000	10 Unit	60.375.250	10 Unit	60.375.250	10 Unit	60.375.250	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	207	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Menunjukkan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3 unit	390.000.000	0	0	0	0	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar
			7	1	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Jasa Penunjang Urusan	Menunjukkan n Jumlah jasa penunjang	Jumlah jasa penunjang urusan	100%	164.020.00	100%	174.042.148	100%	148.611.456	100%	141.511.456	100%	141.511.456	100%	141.511.456	Kec. Telaga Bauntu ng	Kab. Banjar

			7	1	2	2,023	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Menunjukkan jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	5 Laporan	16.800.000	5 Laporan	16.800.000	5 Laporan	23.800.000	5 Laporan	24.609.500	5 Laporan	24.609.500	5 Laporan	24.609.500	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
			7	1	2	2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	Menunjukkan Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	-	100 %	9.500.000	100 %	8.400.000	100 %	13.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
			7	1	2	2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Menunjukkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Laporan	9.500.000	1 Laporan	8.400.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Menunjukkan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%	NA	100%	23.000.000	100%	43.550.000	100%	22.400.000	100%	71.564.000	100%	71.564.000	100%	71.564.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
			7	1	3	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	Menunjukkan Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (Keg PKK, Musrenbang Kec, dan Keg Pemberdayaan Masyarakat Lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing Kec)	jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		100%	23.000.000	100%	43.550.000	100%	35.251.940	100%	71.564.000	100%	71.564.000	100%	71.564.000	Kec. Telaga Bauntung	
			7	1	3	2,01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Menunjukkan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6 LKM	9.000.000	6 LKM	9.000.000	6 LKM	9.700.000	6 LKM	11.500.000	6 LKM	11.500.000	6 LKM	11.500.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar

		7	1	3	2 0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Menunjukkan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7 Laporan	14.700.000	7 Laporan	34.550.000	7 Laporan	12.700.000	7 Laporan	60.064.000	7 Laporan	60.064.000	7 Laporan	60.064.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Menunjukkan Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan meliputi Koordinasi Penyelenggaraan trantibum serta penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100%	NA	100%	6.500.000	100%	9.600.000	100%	47.580.000	100%	22.120.535	100%	22.120.535	100%	22.120.535	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
		7	1	4	2 0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Menunjukkan jumlah penyelenggaraan trantibum yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	jumlah penyelenggaraan trantibum yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%		100%	3.500.000	100%	6.900.000	100%	6.150.000	100%	18.402.535	100%	18.402.535	100%	18.402.535	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
		7	1	4	2 0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Menunjukkan Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terasilitasi	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terasilitasi		2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	3.400.000	2 Laporan	4.100.000	2 Laporan	12.662.535	2 Laporan	12.662.535	2 Laporan	12.662.535	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar

			7	1	4	2 0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Menunjukkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	2.050.000	2 Laporan	5.740.000	2 Laporan	5.740.000	2 Laporan	5.740.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
			7	1	4	2 0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Menunjukkan Jumlah Koordinasi dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	jumlah penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%		100%	3.000.000	100%	2.700.000	100%	41.430.000	100%	3.718.000	100%	3.718.000	100%	3.718.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
			7	1	4	2 0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Menunjukkan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik		2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	2.700.000	2 Laporan	41.430.000	2 Laporan	3.718.000	2 Laporan	3.718.000	2 Laporan	3.718.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan dan pelaksanaan tugas Forkompim	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	NA	100%	45.000.000	100%	72.550.000	100%	52.214.000	100%	118.901.000	100%	118.901.000	100%	118.901.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar
			7	1	5	2 0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi : HUT RI, MTQ, Safari	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan :		100%	45.000.000	100%	72.550.000	100%	52.214.000	100%	118.901.000	100%	118.901.000	100%	118.901.000	Kec. Telaga Bauntung	

								Daerah yang Terfasilitasi	Ramadhan, Kegiatan Keagamaan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%																	
								Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Menunjukkan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun		120 Orang	20.000.000	120 Orang	20.000.000	120 Orang	21.550.000	150 Orang	41.100.000	150 Orang	41.100.000	150 Orang	41.100.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar	
								Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	32.150.000	1 Dokumen	30.664.000	1 Dokumen	38.921.000	1 Dokumen	38.921.000	1 Dokumen	38.921.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar	
								Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Menunjukkan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		NA	NA	12 Laporan	20.400.000	0	0	12 Laporan	38.880.000	12 Laporan	38.880.000	12 Laporan	38.880.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar	
	Meningkatnya fasilitas pembinaan dan pengawasan penyelesaian pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Menunjukkan Jumlah Fasilitas Pemerintahan dan pengawasan desa/kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjarangan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuangan dan aset desa, Terfasilitasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terfasilitasi : jumlah fasilitas yang direncanakan x 100%		NA	100%	7.200.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	128.549.000	100%	29.149.000	100%	29.149.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar

								Tata Pemerintahan Desa		Terfasilitasi																		
							7 1 6 2 0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Menunjukkan Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi		1 Dokumen	1.400.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	8.074.500	1 Dokumen	8.074.500	1 Dokumen	8.074.500	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar	
							7 1 6 2 0 1	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Menunjukkan Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	-	1 Laporan	1.400.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	8.000.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar	
							7 1 6 2 0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Menunjukkan Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	0	0	0	0	1 Dokumen	3.000.000	0	0	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar	
							7 1 6 2 0 1	1 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Menunjukkan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	4 kegiatan	2.000.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar	
							7 1 6 2 0 1	1 0	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Menunjukkan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4 Dokumen	102.400.000	4 Dokumen	102.400.000	4 Dokumen	102.400.000	Kec. Telaga Bauntung	Kab. Banjar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar disajikan pada tabel 7.1, dibawah ini :

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Telaga Bauntung

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	70	77	79	82	85	85

Sumber data : Data di olah

7.2 Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Kecamatan Telaga Bauntung Pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti 2021-2026, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut:

Tabel 7.2 Pedoman Transisi Renstra Kecamatan Telaga Bauntung

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Evaluasi Nilai Kecamatan

BAB VIII

PENUTUP

Demikian penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021-2026.

Selanjutnya perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Telaga Bauntung dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021 - 2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, perubahan Rencana Strategis Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Telaga Bauntung

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis.

Telaga Bauntung, 19 Februari 2024

Camat,



Eddy Handhoko, SE

Pembina TK.I

NIP. 19800521 200501 1 006

LAMPIRAN

1. Pematkhiran kepmen
2. SK Penetapan Perubahan Renstra Telaga Bauntung 2021- 2026
3. Matrik Renstra



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

Alamat :Jalan Batu Babalik RT. 03 Desa Lok Tanah Kec. Telaga Bauntung Kab.Banjar 70673

KEPUTUSAN CAMAT TELAGA BAUNTUNG KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 4 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 - 2026

CAMAT TELAGA BAUNTUNG

- Menimbang : a. Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Telaga Bauntung tentang perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021 - 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sebagai Dokumen Perencanaan Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2021 – 2026;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Telaga Bauntung tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021 – 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telaga Bauntung
Pada tanggal 19 Februari 2024

CAMAT TELAGA BAUNTING

EDDY HANDHOKO, SE
Pembina TK.I
NIP 19800521 200501 1 006

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Banjar;
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar;
3. Inspektur Kabupaten Banjar;
4. Para Pejabat yang bersangkutan;
5. Arsip

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (outcome, Program (output) dan Sub Kegiatan)	Saluran	Data Target pada Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kumulatif Kinerja pada Lima Tahun Perencanaan SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21					
Terseleenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	NILAI		84	2.369.211.653	85	2.132.798.378	86	2.529.579.967	87	3.839.811.551	88,31	2.943.234.551	88,31	2.943.234.551	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			Nilai Evaluasi Kecamatan	NILAI	NA	70	2.369.211.653	77	2.132.798.378	79	2.529.579.967	82	3.839.811.551	85	2.943.234.551	85	2.943.234.551	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar				
		7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI) Kecamatan Telaga Bauntung	NILAI	NA	73	2.260.511.653	74	1.976.898.378	76	2.364.585.967	78	3.459.067.516	80	2.661.890.516	80	2.661.890.516	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar		
		7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase	NA	100	1.815.000	100	1.815.000	100	6.656.000	100	11.046.000	100	11.046.000	100	11.046.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
		7	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	NA	2	270.000	2	270.000	2	644.000	2	1.844.000	2	1.844.000	2	1.844.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
		7	1	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	NA	2	75.000	2	75.000	2	832.000	2	870.000	2	870.000	2	870.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
		7	1	1	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	NA	2	75.000	2	75.000	2	832.000	2	832.000	2	832.000	2	832.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
		7	1	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	NA	2	450.000	2	450.000	2	1.414.000	2	664.000	2	664.000	2	664.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
		7	1	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	NA	2	450.000	2	450.000	2	1.170.000	2	664.000	2	664.000	2	664.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
		7	1	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	NA	1	450.000	1	450.000	1	926.000	1	1.142.000	1	1.142.000	1	1.142.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
		7	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	17	45.000	17	45.000	17	838.000	17	5.030.000	17	5.030.000	17	5.030.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar

7	1	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar		
7	1	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar		
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase	100	100%	9.300.000	100	9.300.000	100	9.100.000	100	12.396.000	100	12.396.000	100	12.396.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
7	1	1	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
7	1	1	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
7	1	1	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
7	1	1	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
7	1	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	4	300.000	4	300.000	4	100.000	4	3.396.000	4	3.396.000	4	3.396.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
7	1	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
7	1	1	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persentase	NA	100%	2.070.000	100%	2.070.000	100%	1.500.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
7	1	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
7	1	1	2.05	0003	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
7	1	1	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	NA	1	2.070.000	1	2.070.000	1	1.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar

						7	1	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar		
						7	1	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar		
						7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	NA	100%	109.625.000	100%	116.027.052	100%	119.060.528	100%	173.363.000	100%	173.363.000	100%	173.363.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	1	1.300.000	1	4.500.000	1	1.800.000	1	2.858.000	1	2.858.000	1	2.858.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	NA	1	3.800.000	1	2.881.052	1	4.418.500	1	4.654.000	1	4.654.000	1	4.654.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	NA	1	10.765.000	1	10.766.000	1	11.977.000	1	11.981.000	1	11.981.000	1	11.981.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	NA	1	3.000.000	1	3.120.000	1	2.630.028	1	2.870.000	1	2.870.000	1	2.870.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	NA	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	NA	1	88.760.000	1	92.760.000	1	95.235.000	1	146.000.000	1	146.000.000	1	146.000.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Persentase	NA	100%	15.500.000	100%	36.439.000	100%	23.918.000	100%	937.802.250	100%	140.625.250	100%	140.625.250	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	480.000.000	2	66.250.000	2	66.250.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	1	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	7.427.000	2	14.000.000	2	14.000.000	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	3	15.500.000	3	36.439.000	4	23.918.000	10	60.375.250	10	60.375.250	10	60.375.250	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	

						7	1	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	390.000.000		0		0	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	NA	100%	164.020.000	100%	174.042.148	100%	148.611.456	100%	141.511.456	100%	141.511.456	100%	141.511.456	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	NA	12	2.000.000	12	2.000.000	12	1.800.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	NA	12	10.200.000	12	14.342.148	12	11.031.456	12	11.031.456	12	11.031.456	12	11.031.456	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	12	151.820.000	12	157.700.000	12	135.780.000	12	127.980.000	12	127.980.000	12	127.980.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase	NA	100%	99.760.000	100	99.646.800	100	123.671.200	100	128.795.200	100	128.795.200	100	128.795.200	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	34.380.000,00	1	34.380.000,00	1	34.380.000,00	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	NA	14	79.180.000	14	80.826.800	14	100.731.200	14	102.525.200	14	102.525.200	14	102.525.200	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	NA	10	8.580.000	10	6.820.000	10	10.804.000	18	14.134.000	18	14.134.000	18	14.134.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	

						7	1	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	3	12.000.000	3	12.000.000	3	12.136.000	3	12.136.000	3	12.136.000	3	12.136.000	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar		
						7	1	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	1	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerta Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	NA	100%	26.300.000	100	25.200.000	100	36.800.000	100	39.609.500	100	39.609.500	100	39.609.500	100	39.609.500	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	2	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	2	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase	NA	100%	16.800.000	100	16.800.000	100	23.800.000	100	24.609.500	100	24.609.500	100	24.609.500	100	24.609.500	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	2	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	2	2.02	0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	

						7	1	3	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	3	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Tanjung Rema Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tanjung Rema Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sekumpul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Keraton)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jawa)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Murung Keraton)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	
						7	1	3	2	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar	

						7	1	6	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	6	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	6	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	6	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar
						7	1	6	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec.Telaga Bauntung	Kab.Banj ar

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEPMENDAGRI 050-3889 TAHUN 2021)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
X																		
X	XX																	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		7	01	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		7	01	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		7	01	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		7	01	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		7	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		7	01	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		7	01	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
X	XX	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
X	XX	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		7	01	01	203	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		7	01	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan

X	XX	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7	01	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
X	XX	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ORANG	7	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ORANG
X	XX	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	7	01	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
X	XX	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				7	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7	01	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7	01	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7	01	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
7 UNSUR KEWILAYAHAN								7 UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01 KECAMATAN								7 01 KECAMATAN									
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN									
7 01 02 202 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja									
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan

7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Lembaga Kemasyarakatan	
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	
7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	
7	01	04	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
7	01	04	202	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	
7	01	04	704		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah					7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan				
7	01	04	704	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		7	01	04	7.04	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	

7	01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen
7	01	06	201	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan	Dokumen	7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan	Dokumen

terangan:

3.XX
4.XX
5.XX
7.XX

: Kabupaten/Kota di Papua
: Kabupaten/Kota di Papua Barat
: Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
: Kabupaten/Kota di Aceh



Talaga Bauntung, Februari 2024

EDDY HANDHOKO, SE
NIP. 19800521 200501 1 006

Mengetahui,
Kepala Bidang PPM Bappedalitbang

